

## Kotak Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah: Perbandingan Dua Daerah

Muharuddin \*, Gustiana A. Kambo, Muhammad

Universitas Hasanuddin

*\*Corresponding Author:* muharuddin0604@gmail.com

### Abstrak

Fenomena kotak kosong dalam Pilkada menjadi bentuk ekspresi politik masyarakat terhadap hadirnya calon tunggal dalam kontestasi elektoral. Penelitian ini membandingkan Pilkada 2018 di Kota Makassar dan Kabupaten Enrekang yang menghasilkan dua dinamika politik yang berbeda: kemenangan kotak kosong di Makassar dan kekalahannya di Enrekang. Penelitian menggunakan metode tinjauan pustaka dengan mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber ilmiah terkait perilaku pemilih, struktur sosial, dan sosialisasi politik pada kedua wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Makassar, kemenangan kotak kosong dipengaruhi oleh tingginya literasi politik, akses informasi yang luas, dan berkembangnya ruang publik digital yang memungkinkan konsolidasi opini kritis terhadap keputusan politik, khususnya terkait diskualifikasi calon petahana. Sebaliknya, di Enrekang, pilihan pemilih lebih banyak ditentukan oleh hubungan patronase, nilai kohesi sosial, dan pola sosialisasi politik yang bersifat personal melalui tokoh agama dan elite lokal, sehingga dukungan terhadap calon tunggal dianggap sebagai bentuk menjaga stabilitas sosial. Studi ini menegaskan bahwa perilaku pemilih dalam konteks calon tunggal tidak seragam, melainkan bergantung pada struktur sosial dan kualitas demokrasi lokal. Temuan ini memberikan implikasi bahwa penguatan ruang deliberatif dan literasi politik menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi politik yang lebih substantif dalam demokrasi lokal.

**Kata Kunci:** Fenomena Kotak Kosong, Pilkada, Makassar, Enrekang, Sosialisasi Politik, Partisipasi Politik

### Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu elemen penting dalam proses demokrasi lokal di Indonesia. Pilkada dan demokrasi tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung. Demokrasi dipahami sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang diwujudkan melalui proses pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Dalam konteks ini, Pilkada tidak hanya menjadi sarana untuk memilih kepala daerah, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen rakyat dalam menegaskan hak politik dan menilai sejauh mana sistem pemerintahan berjalan sesuai aspirasi publik (Harianto et al., 2020).

**Article history:** Received 9/11/2025; Revised 27/4/2026; Accepted 3/5/2026; Published 4/6/2026



© The Author(s), 2026.

Perkembangan demokrasi lokal Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang memperbolehkan pelaksanaan Pilkada dengan hanya satu pasangan calon. Putusan ini dimaksudkan untuk mengatasi kekosongan hukum ketika jumlah pasangan calon tidak memenuhi syarat minimum. Namun, dalam praktiknya, regulasi tersebut melahirkan fenomena baru dalam politik lokal, yakni hadirnya kotak kosong sebagai alternatif pilihan politik bagi rakyat terhadap calon tunggal. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal mahal biaya politik (mahar), dominasi partai besar dalam pembentukan koalisi tunggal, dan minimnya ruang bagi calon independen untuk bersaing (Panjaitan et al., 2024).

Keberadaan calon tunggal sering kali dianggap sebagai kemunduran demokrasi karena menghilangkan hak rakyat untuk memilih secara bebas di antara lebih dari satu pilihan. Meskipun secara hukum calon tunggal dapat dinyatakan menang apabila memperoleh lebih dari 50% suara sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sementara posisi kotak kosong sebagai pesaingnya tidak memiliki regulasi yang jelas. Tidak adanya pengaturan tentang hak dan kewajiban kotak kosong membuatnya sekadar simbol, namun simbol tersebut justru menjadi alat perlawanan demokratis bagi masyarakat yang menolak hegemoni elite politik. Kotak kosong menjadi representasi suara protes terhadap sistem politik yang dianggap tidak representatif dan tidak memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan pilihannya secara bebas (Purwaningsih & Widodo, 2021).

Fenomena kotak kosong menjadi menarik ketika dikaitkan dengan hasil Pilkada serentak tahun 2018 di Kota Makassar dan Kabupaten Enrekang. Kedua daerah ini memperlihatkan hasil yang kontras. Di Makassar, kotak kosong berhasil memenangkan Pilkada melawan pasangan calon tunggal Appi Cicu yang didukung oleh sepuluh partai politik besar. Kemenangan ini menjadi simbol protes rakyat terhadap sistem kekuasaan yang dianggap tertutup dan tidak demokratis (Harianto et al., 2020). Sebaliknya, di Enrekang, meskipun juga hanya memiliki satu calon, kotak kosong justru kalah telak. Hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial dan budaya masyarakat setempat sangat memengaruhi pola perilaku pemilih dan bentuk partisipasi politiknya (Aqsha, 2024).

Kemenangan kotak kosong di Makassar tidak dapat dilepaskan dari kekecewaan publik terhadap keputusan diskualifikasi calon petahana Danny Pomanto–Indira Mulyasari oleh PTUN (Aqsha, 2024). Keputusan tersebut dianggap mencederai keadilan politik dan merampas hak masyarakat untuk memilih calon yang mereka anggap layak. Dalam konteks budaya Bugis-Makassar yang menjunjung tinggi nilai *siri* (harga diri dan kehormatan), tindakan memilih kotak kosong menjadi ekspresi simbolik dari perlawanan

terhadap dominasi elite politik dan bentuk penegasan kedaulatan rakyat. Sebaliknya, masyarakat Enrekang yang lebih homogen dan memiliki hubungan sosial yang erat menunjukkan kecenderungan mendukung calon tunggal sebagai bentuk stabilitas dan loyalitas terhadap kepemimpinan lokal yang mapan.

Untuk memahami perbedaan ini, penelitian ini menggunakan dua kerangka teori utama, yaitu Teori Perilaku Pemilih (*Voter Behavior Theory*) dan Teori Demokrasi Partisipatif (*Participatory Democracy Theory*). Penggunaan kedua teori tersebut dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami dinamika elektoral yang tidak seragam antara dua wilayah dengan karakter sosial-politik yang berbeda. Perbedaan hasil Pilkada antara Makassar dan Enrekang menunjukkan bahwa perilaku memilih tidak dapat dijelaskan hanya dari aspek prosedural pemilu, melainkan harus dilihat sebagai hasil interaksi antara faktor individu, struktur sosial, serta kualitas partisipasi politik masyarakat. Dalam konteks ini, teori perilaku pemilih digunakan untuk menjelaskan bagaimana preferensi politik terbentuk melalui pendekatan sosio-logis, psikologis, dan rasional, sehingga mampu mengungkap mengapa masyarakat urban seperti Makassar cenderung bersikap kritis dan memilih kotak kosong, sementara masyarakat rural seperti Enrekang lebih dipengaruhi oleh patronase dan loyalitas sosial. Di sisi lain, teori demokrasi partisipatif digunakan untuk menilai kualitas keterlibatan politik masyarakat, apakah partisipasi yang terjadi bersifat substantif (kritis, sadar, dan deliberatif) atau sekadar prosedural (formal dan konformis). Dengan mengombinasikan kedua kerangka teori ini, penelitian mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tidak hanya tentang bagaimana pemilih menentukan pilihan, tetapi juga tentang bagaimana tingkat kesadaran demokratis masyarakat membentuk arah dan makna dari partisipasi politik itu sendiri dalam konteks demokrasi lokal yang beragam.

Teori perilaku pemilih menjelaskan bahwa keputusan politik individu dapat dipahami melalui tiga pendekatan utama: sosiologis, psikologis, dan rasional. Pendekatan sosiologis menyoroti pengaruh lingkungan sosial seperti pendidikan, kelas ekonomi, dan komunitas terhadap preferensi politik. Pendekatan psikologis menekankan pengaruh persepsi dan loyalitas terhadap kandidat atau partai politik, sementara pendekatan rasional berasumsi bahwa pemilih memilih secara logis berdasarkan pertimbangan manfaat politik (Campbell et al., 1960). Dalam konteks Makassar, pemilih dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang tinggi cenderung bersikap kritis dan menggunakan kotak kosong sebagai pilihan rasional. Sebaliknya, di Enrekang, pilihan terhadap calon tunggal lebih dipengaruhi oleh hubungan sosial dan loyalitas terhadap elite lokal.

Sementara itu, teori demokrasi partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga negara dalam menentukan arah kebijakan dan dalam mengontrol kekuasaan

politik (Pateman, 1970). Demokrasi yang sehat bukan hanya ditandai oleh adanya pemilu, tetapi oleh tingkat kesadaran dan partisipasi kritis masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam kerangka ini, memilih kotak kosong bukanlah bentuk apatisme, melainkan bentuk partisipasi aktif untuk menuntut demokrasi yang lebih substansial dan representatif. Sebaliknya, kekalahan kotak kosong di Enrekang mencerminkan pola demokrasi prosedural, di mana partisipasi rakyat sebatas memenuhi kewajiban formal dalam pemilu tanpa didasari kesadaran kritis terhadap sistem politik yang berlaku.

Fenomena kotak kosong dalam Pilkada 2018 di Makassar dan Enrekang menunjukkan adanya dua wajah demokrasi lokal di Indonesia. Kemenangan kotak kosong di Makassar merepresentasikan kesadaran demokratis masyarakat urban yang kritis terhadap oligarki politik dan ketidakadilan dalam proses elektoral. Sebaliknya, kekalahan kotak kosong di Enrekang menggambarkan bentuk demokrasi formal yang masih didominasi oleh pengaruh elite lokal dan ikatan sosial yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang menyebabkan perbedaan hasil tersebut, serta menjelaskan bagaimana perilaku pemilih dan tingkat partisipasi politik masyarakat lokal mencerminkan kualitas demokrasi di tingkat daerah.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka untuk mengkaji fenomena kotak kosong dalam Pilkada di Kota Makassar dan Kabupaten Enrekang. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemunculan kotak kosong, serta bagaimana dinamika sosial, politik, dan budaya lokal membentuk perbedaan hasil di kedua daerah tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan mendeskripsikan sekaligus menganalisis fenomena kotak kosong berdasarkan data sekunder yang tersedia. Analisis dilakukan dengan membandingkan kedua kasus guna mengidentifikasi faktor-faktor yang menjelaskan variasi hasil Pilkada antara Makassar dan Enrekang. Melalui tinjauan literatur, penelitian ini juga berupaya menelusuri konteks sosial-politik masing-masing daerah pada periode Pilkada 2018, serta menilai implikasinya terhadap hasil pemilihan dan pola perilaku pemilih.

## Pembahasan

### *Kemenangan Kotak Kosong di Makassar*

Pilkada merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan demokrasi lokal di Indonesia yang berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana artikulasi kedaulatan rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Dalam konteks ideal, Pilkada menyediakan ruang kompetisi yang terbuka, adil, dan kompetitif bagi para kandidat, sehingga masyarakat memiliki alternatif pilihan yang rasional dan representatif. Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa dinamika Pilkada di berbagai daerah tidak selalu berjalan dalam kondisi kompetitif yang seimbang. Faktor seperti dominasi partai politik, terbatasnya jumlah kandidat, serta konfigurasi sosial dan budaya lokal sering kali memengaruhi kualitas kontestasi elektoral dan membentuk variasi respons politik masyarakat. Perbedaan karakteristik sosial antara wilayah perkotaan dan pedesaan, misalnya, turut menentukan bagaimana masyarakat memaknai proses pemilihan dan menggunakan hak pilihnya.

Kondisi tersebut semakin kompleks seiring dengan adanya perubahan regulasi dalam sistem Pilkada, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang membuka kemungkinan penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal. Kebijakan ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai solusi atas kebuntuan administratif ketika jumlah pasangan calon tidak memenuhi syarat minimal. Namun demikian, dalam perspektif demokrasi, kondisi ini menimbulkan konsekuensi terhadap menyempitnya ruang kompetisi politik, sehingga masyarakat tidak lagi dihadapkan pada pilihan alternatif yang beragam. Dominasi partai politik dalam membentuk koalisi besar juga berpotensi memperkuat kecenderungan tersebut, yang pada akhirnya dapat menggeser makna Pilkada dari arena kompetisi demokratis menjadi sekadar mekanisme formal legitimasi kekuasaan.

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa praktik demokrasi lokal tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan struktur kekuasaan yang melingkupinya. Variasi karakteristik masyarakat, baik dari segi tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, maupun pola relasi sosial, turut memengaruhi cara masyarakat memaknai dan merespons proses elektoral. Pada masyarakat dengan tingkat literasi politik yang tinggi, kecenderungan untuk bersikap kritis terhadap proses politik menjadi lebih kuat, sedangkan pada masyarakat dengan struktur sosial yang berbasis patronase dan kohesi sosial yang tinggi, pilihan politik sering kali diarahkan pada upaya menjaga stabilitas dan harmoni sosial. Pilkada tidak hanya merefleksikan proses elektoral semata, tetapi juga menjadi cerminan dari interaksi antara struktur sosial dan kesadaran politik masyarakat.

Oleh karena itu, analisis terhadap dinamika Pilkada memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut membentuk perilaku pemilih dan kualitas partisipasi politik dalam konteks demokrasi lokal.

Persoalan kotak kosong dalam Pilkada di Indonesia mencerminkan dinamika politik lokal yang kompleks dan mencolok, terutama dalam konteks munculnya calon tunggal. Fenomena ini menggugah perhatian akademisi dan masyarakat karena menandakan adanya sikap skeptis dan penolakan terhadap sistem representasi politik yang dianggap tidak demokratis. Kotak kosong sendiri menjadi pilihan politik bagi pemilih yang tidak setuju dengan calon yang tersedia. Dalam konteks demokrasi lokal, fenomena ini bukan sekadar persoalan teknis pemilu, tetapi juga menyangkut legitimasi politik, kualitas partisipasi warga, dan arah perkembangan demokrasi di tingkat daerah.

Studi tentang fenomena kotak kosong pada Pilkada Makassar dan Enrekang tahun 2018 memperlihatkan dua hasil yang sangat berbeda. Di Makassar, kotak kosong justru meraih kemenangan dan menjadi simbol resistensi terhadap sistem politik yang tertutup. Sebaliknya, di Enrekang, kotak kosong gagal memperoleh dukungan signifikan, meskipun sebagian masyarakat mengakui ketidakpuasan terhadap calon tunggal yang ada. Perbedaan hasil ini memperlihatkan bahwa perilaku pemilih dalam menghadapi calon tunggal tidak semata-mata dipengaruhi oleh aturan pemilu, tetapi juga oleh struktur sosial, tingkat pendidikan, budaya politik, dan proses sosialisasi politik di masing-masing daerah.

Kemenangan kotak kosong di Makassar berakar dari ketegangan antara rakyat dan elite politik. Awalnya, Pilkada Makassar diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Danny Pomanto–Indira Mulyasari (DIAMI) dan Munafri Arifuddin–Andi Rachmatika Dewi (Appi–Cicu) yang didukung oleh sepuluh partai besar. Namun, keputusan Mahkamah Agung melalui PT TUN yang mendiskualifikasi pasangan DIAMI menjelang pemilihan menimbulkan gelombang kemarahan publik. Publik memandang keputusan tersebut tidak adil dan sarat kepentingan politik. Di tengah kekecewaan itu, muncul gerakan sosial organik dengan slogan “Makassar Tidak Butuh Boneka” dan “Ayo Coblos Kotak Kosong” yang berkembang pesat melalui media sosial.

Kampanye ini menjadi simbol perlawanan terhadap sistem politik yang oligarkis dan menandai perubahan paradigma warga dari sekadar pemilih pasif menjadi pemilih partisipatif. Gerakan ini juga menggambarkan praktik nyata demokrasi partisipatif sebagaimana dijelaskan oleh Pateman (1970) dan Barber (1984), yakni keterlibatan warga untuk menegaskan kembali prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat. Pemilih tidak lagi hanya menggunakan hak suaranya untuk memilih calon yang tersedia, tetapi juga untuk menolak dominasi elite politik yang menutup ruang kompetisi.

Dalam kerangka teori perilaku pemilih, pilihan terhadap kotak kosong di Makassar dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan sosiologis, yang melihat bahwa masyarakat perkotaan dengan pendidikan tinggi, mobilitas sosial tinggi, dan akses informasi luas cenderung kritis terhadap elite politik (Damanik, 2018). Kedua, pendekatan psikologis, di mana ketidakpuasan terhadap proses politik dan persepsi ketidakadilan menimbulkan penolakan emosional yang terorganisir terhadap calon tunggal. Ketiga, pendekatan rasional (*rational choice*) menjelaskan bahwa memilih kotak kosong merupakan strategi sadar masyarakat untuk menjaga integritas demokrasi jangka panjang (Downs, 1957). Dalam konteks ini, perilaku pemilih Makassar menunjukkan pergeseran menuju politik yang lebih rasional, kritis, dan berbasis kesadaran ideologis, bukan loyalitas partai.

Kemenangan kotak kosong di Makassar juga menunjukkan adanya krisis legitimasi terhadap partai politik. Calon tunggal yang didukung oleh hampir seluruh partai besar justru kalah dari kolom kosong, yang menandakan bahwa partai tidak lagi menjadi penentu utama pilihan publik. Fenomena ini menegaskan bahwa masyarakat urban telah belajar menggunakan hak pilihnya secara reflektif untuk menegur sistem yang dianggap tidak representatif. Dengan demikian, kotak kosong menjadi bentuk "*political learning*" kolektif proses di mana rakyat belajar bahwa partisipasi politik tidak hanya berarti mendukung calon, tetapi juga dapat menjadi alat koreksi terhadap sistem kekuasaan (Aqsha, 2024; Harianto et al., 2020).

### ***Kekalahan Kotak Kosong di Kabupaten Enrekang***

Fenomena Pilkada Enrekang 2018 memperlihatkan kontras yang mencolok dengan kasus Makassar. Jika Makassar menjadi simbol perlawanan terhadap hegemoni politik lokal melalui kemenangan kotak kosong, maka di Enrekang, kotak kosong justru mengalami kekalahan. Kondisi ini menggambarkan bahwa dinamika politik lokal tidak hanya ditentukan oleh regulasi elektoral atau jumlah calon, tetapi juga oleh karakter sosial, budaya politik, dan bentuk sosialisasi politik masyarakat yang berbeda.

Enrekang merupakan wilayah dengan struktur sosial yang homogen dan kultur sosial yang komunal. Di masyarakat seperti ini, ikatan sosial, kekerabatan, dan hubungan personal memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan perilaku politik warga. Calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada 2018 memiliki jaringan sosial yang kuat dengan masyarakat, baik melalui hubungan kekeluargaan, patronase ekonomi, maupun kedekatan sosial. Oleh karena itu, meskipun terdapat ketidakpuasan terhadap calon tunggal, masyarakat tetap memilih kandidat tersebut karena adanya tekanan sosial dan budaya untuk menjaga harmoni serta stabilitas lokal.

Dalam konteks teori perilaku pemilih, fenomena Enrekang dapat dijelaskan melalui pendekatan sosiologis klasik, yang menekankan bahwa preferensi pemilih dipengaruhi oleh struktur sosial dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat (Colman, 2003). Pemilih Enrekang tidak menentukan pilihan berdasarkan kalkulasi rasional seperti yang terjadi di Makassar, melainkan berdasarkan loyalitas sosial dan norma tradisional. Loyalitas ini mencerminkan pola perilaku politik komunal, di mana kepatuhan terhadap otoritas lokal dan elite politik dianggap lebih penting daripada ekspresi ketidakpuasan melalui pilihan alternatif seperti kotak kosong.

Selain itu, nilai-nilai sosial yang menjunjung stabilitas dan keamanan turut memperkuat sikap konservatif masyarakat Enrekang. Pilihan untuk mendukung calon tunggal dipandang sebagai bentuk partisipasi yang bertanggung jawab untuk menjaga kedamaian dan kesinambungan pemerintahan daerah. Dalam kerangka teori demokrasi partisipatif (Pateman, 1970), kondisi ini menunjukkan adanya partisipasi politik yang bersifat formalistik masyarakat berpartisipasi dalam pemilu tetapi belum terlibat secara aktif dan kritis dalam menentukan arah kebijakan publik. Demokrasi di Enrekang berjalan secara prosedural, bukan substantif.

Keberhasilan calon tunggal dalam mengalahkan kotak kosong juga tidak lepas dari efektivitas strategi politik dan mobilisasi dukungan oleh jaringan partai dan patron lokal. Seperti diuraikan oleh Aqsha (2024), kekuatan politik di daerah pedesaan sangat bergantung pada kedekatan personal antara calon dan masyarakat. Calon tunggal biasanya memosisikan diri sebagai “pelindung rakyat” atau figur paternalistik yang dianggap mampu menjaga kestabilan sosial. Dukungan dari partai-partai besar memperkuat posisi ini, sebab mesin politik mereka bekerja hingga ke tingkat dusun dan desa melalui struktur sosial yang hierarkis.

Sementara itu, sosialisasi politik di Enrekang menunjukkan pola yang berbeda dari kota besar seperti Makassar. Berdasarkan kajian Kambo (2021), agen sosialisasi politik utama di daerah ini bukan media massa atau organisasi sipil, tetapi keluarga, tokoh agama, dan patron politik. Proses sosialisasi politik yang berlangsung melalui hubungan tatap muka, forum keagamaan, dan jaringan patron-klien membuat masyarakat lebih cenderung menerima informasi secara satu arah dari elite politik. Akibatnya, kesadaran politik yang berkembang bersifat normatif, bukan reflektif. Pemilih menilai politik sebagai bagian dari tatanan sosial yang tidak perlu digugat, selama membawa stabilitas dan harmoni.

Kondisi ini juga menjelaskan lemahnya dukungan terhadap kotak kosong. Pilihan terhadap kotak kosong tidak dianggap sebagai bentuk protes konstruktif, tetapi sebagai tindakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian politik. Tidak adanya figur atau

simbol yang dapat mempersonifikasikan aspirasi masyarakat di balik kotak kosong menyebabkan pilihan tersebut terasa abstrak dan sulit diterima. Seperti diungkapkan Kambo (2021), masyarakat dalam kultur patronase membutuhkan representasi nyata dalam politik seorang figur yang bisa dijadikan titik orientasi sosial dan emosional. Karena kotak kosong tidak memiliki figur, ia gagal memobilisasi dukungan dalam konteks masyarakat yang masih berbasis hubungan personal dan kekeluargaan.

Dalam kerangka teori sosialisasi politik (Rush & Althoff, 1971), masyarakat Enrekang menunjukkan dominasi agen-agen sosialisasi tradisional yang membentuk orientasi politik pasif. Sosialisasi politik yang berlangsung melalui tokoh adat dan keluarga memperkuat nilai-nilai konservatif dan kepatuhan terhadap struktur sosial. Akibatnya, partisipasi politik warga lebih bersifat konformis, mengikuti arahan elite atau tokoh lokal, bukan hasil refleksi pribadi terhadap isu politik. Kondisi ini berbeda jauh dengan Makassar, di mana sosialisasi politik berlangsung dinamis melalui media digital dan organisasi masyarakat sipil yang mendorong perilaku politik kritis.

Kekalahan kotak kosong di Enrekang bukanlah tanda rendahnya kesadaran politik, tetapi cerminan karakter demokrasi lokal yang masih berbasis pada loyalitas sosial dan patronase. Demokrasi di Enrekang berjalan dalam bingkai harmoni sosial yang kuat, di mana stabilitas dianggap sebagai nilai tertinggi. Meski masyarakat sadar akan keterbatasan pilihan, mereka memilih untuk mempertahankan sistem sosial yang aman dan teratur daripada mengganggu keseimbangan dengan memilih kotak kosong.

Namun, dari perspektif demokrasi partisipatif, situasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik di daerah pedesaan. Partisipasi yang hanya bersifat formal perlu dikembangkan menjadi partisipasi substantif melalui pendidikan politik dan penguatan kesadaran warga. Sebagaimana disarankan Kambo (2021), daerah dengan kultur tradisional seperti Enrekang memerlukan model pendidikan politik yang berbasis lokal, yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan tradisi dengan prinsip demokrasi modern. Masyarakat dapat tetap menjaga stabilitas sosial tanpa kehilangan kemampuan untuk bersikap kritis terhadap proses politik.

Dinamika Pilkada Enrekang 2018 menggambarkan bentuk demokrasi partikularistik, di mana pemilih memaknai partisipasi sebagai ruang untuk melawan sistem, tetapi untuk menjaga tatanan sosial yang ada. Demokrasi di sini berjalan dalam bentuk paling dasar terbuka terhadap partisipasi, tetapi belum sepenuhnya mendorong refleksi kritis dan deliberatif. Walaupun berbeda dengan Makassar yang cenderung protesif dan rasional, demokrasi di Enrekang tetap memperlihatkan aspek penting dari politik lokal Indonesia: bahwa kesetiaan sosial, kohesi komunitas, dan patronase masih menjadi variabel utama dalam perilaku pemilih dan hasil Pilkada di tingkat daerah.

Dalam konteks Pilkada Enrekang 2018, kemenangan calon tunggal tidak dapat dilepaskan dari kuatnya figur pasangan yang maju, yaitu Muslimin Bando – Asman. Sosok Muslimin Bando, sebagai petahana pada periode sebelumnya, memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang relatif tinggi di kalangan masyarakat Enrekang. Pengalaman birokrasi serta rekam jejak kepemimpinan yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi modal politik utama dalam mempertahankan kekuasaan. Dalam perspektif politik lokal, figur petahana sering kali memiliki keunggulan struktural berupa akses terhadap sumber daya, jaringan pemerintahan, serta kedekatan emosional dengan masyarakat yang telah terbangun selama masa jabatan sebelumnya.

Selain itu, posisi Asman sebagai pasangan calon turut memperkuat basis dukungan politik. Kombinasi ini tidak hanya mencerminkan keseimbangan kekuatan politik, tetapi juga memperluas jangkauan dukungan hingga ke berbagai kelompok sosial di Enrekang. Dalam sistem politik lokal yang masih kental dengan pola patronase, figur kandidat memainkan peran sentral sebagai representasi kekuasaan dan pelindung kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran calon tunggal yang memiliki legitimasi kuat secara personal membuat masyarakat cenderung melihatnya sebagai pilihan yang “aman” dan dapat menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.

Kekuatan figur ini diperkuat oleh dukungan partai politik yang relatif solid. Minimnya kompetitor dalam Pilkada Enrekang menunjukkan adanya konsolidasi elite politik di tingkat lokal, yang secara tidak langsung mengarahkan preferensi masyarakat kepada satu kandidat. Dalam situasi seperti ini, pilihan politik masyarakat menjadi semakin terbatas secara substantif, namun secara psikologis tetap diarahkan kepada figur yang telah dikenal dan dipercaya. Hal ini berbeda dengan kasus Makassar, di mana calon tunggal tidak memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata publik akibat dinamika politik sebelumnya.

Dalam kerangka teori kepemimpinan politik, figur Muslimin Bando dapat dikategorikan sebagai pemimpin dengan basis legitimasi tradisional dan kinerja (*performance legitimacy*). Legitimasi tradisional terlihat dari kedekatan sosial dan jaringan kekerabatan yang luas, sementara legitimasi kinerja muncul dari persepsi masyarakat terhadap keberhasilan program-program pembangunan yang telah dijalankan. Kombinasi kedua bentuk legitimasi ini menjadikan calon tunggal di Enrekang tidak hanya diterima, tetapi juga didukung secara aktif oleh masyarakat.

Kekalahan kotak kosong di Enrekang tidak hanya disebabkan oleh faktor budaya politik dan sosialisasi, tetapi juga oleh kuatnya figur kandidat yang mampu mengonsolidasikan dukungan secara luas. Figur calon menjadi variabel kunci yang menjelaskan mengapa masyarakat tidak menggunakan kotak kosong sebagai alat

resistensi, melainkan justru memperkuat legitimasi kekuasaan yang sudah ada. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks demokrasi lokal, personalisasi politik masih menjadi faktor dominan dalam menentukan arah pilihan pemilih.

### ***Perbandingan Hasil Pilkada***

Kasus Kota Makassar pada Pilkada 2018 menunjukkan bagaimana kotak kosong dapat bertransformasi menjadi kekuatan politik yang signifikan. Kemenangan kotak kosong tidak terlepas dari dinamika politik yang bersifat konfliktual, terutama setelah diskualifikasi kandidat petahana yang memiliki basis dukungan kuat. Kondisi ini memicu ketidakpuasan publik yang kemudian terakumulasi dalam bentuk dukungan terhadap kotak kosong. Pilihan terhadap kotak kosong tidak lagi bersifat pasif, melainkan menjadi ekspresi aktif dari resistensi masyarakat terhadap konfigurasi politik yang dianggap tidak adil atau tidak representatif. Fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, pemilih mampu menggunakan ruang demokrasi yang tersedia untuk menolak legitimasi kandidat yang diajukan oleh elite politik.

Sebaliknya, Pilkada Enrekang memperlihatkan dinamika yang relatif berbeda. Meskipun sama-sama menghadirkan calon tunggal, hasil pemilihan menunjukkan kemenangan kandidat tanpa perlawanan berarti dari kotak kosong. Hal ini mengindikasikan bahwa kandidat yang maju memiliki legitimasi sosial dan politik yang cukup kuat di mata masyarakat. Tidak adanya konflik politik yang signifikan serta minimnya mobilisasi untuk mendukung kotak kosong menyebabkan opsi tersebut tidak berkembang sebagai gerakan politik alternatif. Dalam konteks ini, kotak kosong hanya berfungsi sebagai mekanisme formal dalam sistem pemilihan, tanpa memiliki daya tarik substantif bagi pemilih.

Perbandingan antara kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa perilaku pemilih dalam pilkada calon tunggal sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kandidat serta dinamika politik lokal yang berkembang. Di Makassar, rendahnya legitimasi kandidat dan tingginya ketegangan politik mendorong masyarakat untuk menggunakan kotak kosong sebagai alat perlawanan. Sementara itu, di Enrekang, stabilitas politik dan kuatnya legitimasi kandidat menghasilkan tingkat penerimaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Dengan kata lain, kotak kosong tidak secara otomatis menjadi ancaman bagi calon tunggal, melainkan hanya akan efektif ketika terdapat kondisi sosial-politik yang mendukung munculnya resistensi publik.

Dapat disimpulkan bahwa fenomena pilkada calon tunggal tidak dapat dipahami secara seragam, melainkan harus dianalisis berdasarkan konteks lokal masing-masing daerah. Kemenangan kotak kosong di Makassar merupakan anomali yang mencerminkan

tingginya partisipasi politik dalam bentuk resistensi, sedangkan kemenangan calon tunggal di Enrekang menunjukkan keberlanjutan legitimasi politik yang relatif stabil. Temuan ini menegaskan pentingnya memperhatikan faktor-faktor kontekstual dalam menganalisis demokrasi lokal, serta perlunya penguatan sistem politik untuk memastikan bahwa proses demokrasi tetap kompetitif, inklusif, dan representatif.

Tabel 1. Perbandingan Hasil Pilkada Kota Makassar dan Kabupaten Enrekang

| No. | Aspek<br>Pebandingan | Makassar                                       | Enrekang                        |
|-----|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Jenis Pilkada        | Pemilihan Wali Kota                            | Pemilihan Bupati                |
| 2   | Pola Kontestasi      | Calon tunggal vs kotak kosong                  | Calon tunggal vs kotak kosong   |
| 3   | Pasangan Calon       | Appi–Cicu                                      | Muslimin Bando – As-man         |
| 4   | Hasil Akhir          | Kotak kosong menang                            | Calon tunggal menang            |
| 5   | Persentase Suara     | Kotak kosong $\pm 53\%$                        | Calon tunggal unggul            |
| 6   | Selisih Suara        | $\pm 36$ ribu suara                            | Tidak dilaporkan signifikan     |
| 7   | Dinamika Politik     | Konfliktual                                    | Relatif stabil                  |
| 8   | Legitimasi Kandidat  | Lemah                                          | Kuat                            |
| 9   | Peran Kotak Kosong   | Simbol perlawanan politik                      | Alternatif formal               |
| 10  | Partisipasi Politik  | Tinggi (mobilisasi kotak kosong)               | Normal                          |
| 11  | Dampak Politik       | Pilkada diulang 2020                           | Tidak ada pengulangan           |
| 12  | Signifikansi         | Kasus pertama kotak kosong menang di Indonesia | Kasus umum calon tunggal menang |

*Sumber: Diolah oleh penulis.*

### ***Perbandingan Faktor Penentu***

Fenomena kotak kosong Pilkada 2018 pada dasarnya menunjukkan bagaimana dinamika sosial, politik, dan komunikasi publik dapat membentuk perilaku pemilih yang berbeda di tiap daerah. Kota Makassar dan Kabupaten Enrekang menjadi contoh konkret dari dua model demokrasi lokal yang kontras satu merepresentasikan demokrasi urban yang

partisipatif dan terbuka, sementara lainnya menunjukkan demokrasi rural yang stabil namun konservatif. Analisis perbandingan ini menyoroti empat faktor utama: peran media, opini publik, jejaring sosial politik, dan tingkat partisipasi pemilih, yang saling berinteraksi dalam memengaruhi hasil Pilkada di kedua wilayah tersebut.

Dalam konteks peran media, Pilkada Makassar memperlihatkan dominasi media sosial dalam membentuk opini publik dan mobilisasi politik. Akses masyarakat terhadap informasi yang luas menjadikan media digital sebagai ruang deliberatif tempat warga mengekspresikan kritik dan membangun solidaritas politik. Kampanye “Makassar Tidak Butuh Boneka” di media sosial menunjukkan bagaimana masyarakat mampu mengartikulasikan kekecewaan terhadap sistem politik yang dianggap elitis dan tertutup (Aqsha, 2024). Dengan dukungan *grassroots*, media menjadi sarana demokrasi partisipatif yang memfasilitasi diskursus publik serta menguatkan kesadaran politik kolektif (Harianto et al., 2020).

Sebaliknya, di Kabupaten Enrekang, peran media masih terbatas pada penyebaran informasi formal yang dikontrol oleh elite lokal. Minimnya akses terhadap media daring dan dominasi media konvensional, seperti radio dan forum sosial desa, membuat masyarakat cenderung menerima informasi secara satu arah tanpa adanya diskursus kritis. Media di Enrekang berfungsi sebagai alat legitimasi elite politik, bukan sebagai ruang deliberasi publik (Kambo, 2021). Akibatnya, wacana kotak kosong tidak berkembang secara luas dan gagal menjadi simbol resistensi politik sebagaimana di Makassar.

Opini publik juga berkembang secara berbeda di kedua daerah. Di Makassar, opini publik bersifat kritis dan deliberatif masyarakat aktif berdebat di ruang publik dan menilai bahwa calon tunggal adalah simbol dari kemerosotan demokrasi. Publik menggunakan kotak kosong sebagai sarana menegakkan kedaulatan rakyat. Sebaliknya, di Enrekang, opini publik lebih homogen dan diarahkan oleh otoritas sosial seperti tokoh agama, kepala adat, dan elite politik. Norma sosial yang menekankan harmoni dan stabilitas membuat masyarakat cenderung memilih jalan aman dengan mendukung calon tunggal daripada mengambil risiko sosial dengan memilih kotak kosong.

Perbedaan berikutnya terletak pada jejaring sosial politik. Makassar memiliki struktur jejaring horizontal yang kuat antara masyarakat sipil, aktivis, akademisi, dan komunitas muda. Keterhubungan ini memungkinkan mobilisasi politik berbasis nilai dan kesadaran partisipatif suatu bentuk *social capital* yang memfasilitasi perlawanan terhadap hegemoni partai besar. Sementara itu, Enrekang menunjukkan struktur jejaring vertikal berbasis patronase, di mana hubungan politik dibangun atas dasar loyalitas personal

terhadap elite lokal. Masyarakat memandang politik sebagai relasi patron-klien, bukan ruang kompetisi gagasan (Marbun et al., 2022).

Faktor terakhir yang mempertegas perbedaan antara kedua daerah adalah tingkat partisipasi pemilih. Meskipun keduanya menunjukkan angka partisipasi tinggi secara kuantitatif, motivasi di baliknya sangat berbeda. Di Makassar, pemilih menggunakan partisipasi sebagai ekspresi kontrol sosial dan bentuk demokrasi partisipatif (Pateman, 1970; Barber, 1984). Mereka memilih kotak kosong sebagai tindakan rasional untuk menolak sistem yang dianggap tidak representatif (Downs, 1957). Sebaliknya, partisipasi di Enrekang lebih bersifat formalistik dan konformis warga datang ke TPS karena tekanan sosial dan rasa tanggung jawab terhadap stabilitas sosial, bukan karena kesadaran politik kritis.

Table 2. Perbandingan Sosialisasi Politik antara Makassar dan Enrekang pada Pilkada 2018

| <b>Faktor Penentu</b>   | <b>Makassar (Kemenangan Kotak Kosong)</b>                                                                                             | <b>Enrekang (Kekalahan Kotak Kosong)</b>                                                   | <b>Implikasi Teoretis</b>                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peran Media             | Media sosial berfungsi sebagai ruang deliberatif dan mobilisasi publik (Makassar Tidak Butuh Boneka). Akses informasi luas dan bebas. | Media tradisional mendominasi, informasi dikontrol elite lokal; diskursus publik terbatas. | Mencerminkan demokrasi partisipatif (Pateman, 1970) dan sosialisasi politik melalui media (McLeod, 2001). |
| Opini Publik            | Bersifat kritis dan kolektif; opini publik menjadi kekuatan politik yang menolak hegemoni partai besar.                               | Bersifat homogen dan terpimpin; masyarakat mengikuti opini elite demi stabilitas sosial.   | Sesuai Teori Perilaku Pemilih Sosiologis (Berelson et al., 1954).                                         |
| Jejaring Sosial Politik | Horizontal dan berbasis komunitas sipil; muncul                                                                                       | Vertikal dan patronase; hubungan politik                                                   | Menggambarkan Teori Sosialisasi Politik yang                                                              |

|                     |                                                                                       |                                                                          |                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | gerakan grassroots yang otonom.                                                       | ditentukan oleh kedekatan dengan elite.                                  | dipengaruhi struktur sosial lokal.                                                       |
| Partisipasi Pemilih | Partisipasi kritis dan deliberatif; pemilih aktif menggunakan hak suara untuk protes. | Partisipasi konformis; pemilih memilih demi menjaga keharmonisan sosial. | Mendukung Teori Demokrasi Partisipatif (Barber, 1984) dan Rational Choice (Downs, 1957). |

*Sumber: Diolah oleh penulis.*

Dari Table 2 tampak bahwa struktur sosial dan politik lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap arah perilaku pemilih. Di Makassar, kotak kosong menjadi simbol kesadaran politik warga urban yang menolak dominasi oligarki, sedangkan di Enrekang, nilai-nilai sosial tradisional seperti stabilitas dan kepatuhan terhadap elite menjadi faktor penentu dalam mengalahkan kotak kosong.

Perbedaan ini menegaskan bahwa fenomena kotak kosong bukan semata-mata persoalan administratif atau teknis pemilu, melainkan refleksi dari kualitas demokrasi lokal yang bergantung pada sejauh mana masyarakat memiliki otonomi politik dan kebebasan beropini. Makassar menunjukkan potensi berkembangnya demokrasi partisipatif yang berbasis kesadaran kolektif, sementara Enrekang menggambarkan demokrasi konsensual yang lebih menekankan stabilitas sosial. Kedua pola ini memperlihatkan bahwa demokrasi di Indonesia bersifat majemuk dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-kultural masing-masing wilayah.

## Kesimpulan

Fenomena kotak kosong dalam Pilkada Makassar dan Enrekang tahun 2018 memperlihatkan bahwa pilihan politik pemilih dalam situasi calon tunggal tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kandidat, tetapi oleh struktur sosial, pola sosialisasi politik, dan kualitas ruang publik di masing-masing daerah. Di Makassar, kemenangan kotak kosong muncul sebagai bentuk resistensi terhadap proses elektoral yang dipersepsikan tidak adil setelah diskualifikasi pasangan DIAMI. Dinamika ini menunjukkan bahwa masyarakat urban dengan akses informasi luas dan tradisi partisipasi publik yang aktif mampu mengartikulasikan pilihan politik sebagai bentuk koreksi terhadap praktik kekuasaan. Sosialisasi politik berlangsung secara horizontal melalui komunitas, organisasi

masyarakat sipil, dan media digital, menciptakan opini publik kritis yang memosisikan kotak kosong bukan sebagai sikap apatis, tetapi sebagai tindakan sadar mempertahankan otonomi politik warga.

Sebaliknya, kekalahan kotak kosong di Enrekang menunjukkan bahwa politik lokal masih beroperasi dalam kerangka hubungan patronase dan loyalitas kekerabatan. Masyarakat memaknai pemilihan sebagai bagian dari keberlanjutan harmoni sosial, bukan arena kontestasi atau kontrol terhadap arena kekuasaan. Sosialisasi politik bersifat personal dan hierarkis melalui tokoh agama, elite lokal, dan jejaring keluarga, sehingga pilihan untuk mendukung calon tunggal muncul sebagai bentuk kepatuhan terhadap struktur sosial yang dianggap stabil dan sah. Kotak kosong tidak hadir sebagai simbol yang memiliki makna sosial karena tidak terkait dengan figur atau kedekatan emosional yang dapat diterima oleh masyarakat.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat pandangan dalam teori perilaku pemilih bahwa orientasi politik ditentukan oleh pola keterikatan sosial, persepsi terhadap kandidat, dan kalkulasi manfaat yang dipahami secara situasional. Makassar menunjukkan dominasi orientasi pemilih berbasis evaluasi rasional dan identitas politik yang kritis, sedangkan Enrekang menunjukkan dominasi orientasi sosiologis yang berakar pada nilai kolektivitas dan hierarki sosial. Temuan ini juga mempertegas Teori Demokrasi Partisipatif yang menekankan bahwa kualitas demokrasi tidak ditentukan oleh keberadaan pemilu itu sendiri, tetapi oleh sejauh mana masyarakat memiliki kapasitas reflektif untuk menilai, menerima, atau menolak kekuasaan.

Fenomena kotak kosong mengungkap bahwa kualitas demokrasi lokal bersifat variatif dan dipengaruhi oleh sejauh mana ruang publik memungkinkan debat dan perumusan sikap politik secara terbuka. Ketika ruang deliberasi kuat dan akses informasi terbuka, kotak kosong dapat berfungsi sebagai instrumen koreksi sistem politik. Namun ketika politik terstruktur dalam loyalitas sosial dan patronase, pilihan politik cenderung bersifat konsensual dan stabil, meskipun tidak selalu kritis. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan demokrasi lokal memerlukan perluasan literasi politik dan pembukaan ruang diskursif yang memungkinkan masyarakat tidak sekadar berpartisipasi dalam pemilu, tetapi juga membangun kesadaran politik yang reflektif.

### **Pernyataan Keaslian**

Kami menyatakan bahwa artikel ini adalah hasil karya orisinal yang bebas dari plagiarisme dan kami telah mencantumkan seluruh referensi yang digunakan serta artikel ini belum pernah dipublikasikan maupun dikirimkan ke penerbit lainnya.

## Referensi

- Aqsha BS, M. (2024). Faktor Kemenangan Kotak Kosong pada Pilkada Kota Makassar 2018. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 9428–9431. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.31265>
- Barber, B. R. (1984). *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. University of California Press.
- Berelson, B., Lazarsfeld, P., & McPhee, W. (1954). *Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign*. University of Chicago Press.
- Campbell, A., Converse, P., Miller, W., & Stokes, D. (1960). *The American Voter*. Wiley.
- Colman, A. M. (2003). *A Dictionary of Psychology*. Oxford University Press.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. Harper & Row.
- Hariato, H., Darmawan, W. B., & Muradi, M. (2020). The Winning of Empty Box in the 2018 Makassar Regional Head Election. *Society*, 8(2), 546–556. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.203>
- Kambo, G. (2021). Mobilisasi Massa Kemenangan Kolom Kosong Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018. *Jurnal Politik Profetik*, 9(2), 278–297. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2a6>
- Mahkamah Konstitusi R I. (2015). *Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 tentang Pilkada dengan calon tunggal*.
- Marbun, K. N., Silas, J., & Nurzaman, T. (2022). Gerakan Koko (Kotak Kosong): Studi Kasus Pada Pilkada Humbang Hasundutan Tahun 2020. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 3(2), 16–30. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i2.95>
- Panjaitan, M., Rajagukguk, J., & Hulu, S. B. F. (2024). Analisis Proses dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020. *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 902–907. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3806>
- Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press.
- Purwaningsih, T., & Widodo, B. E. C. (2021). Democracy without contestation: The victory of the empty box in the local election of Makassar City, South Sulawesi Indonesia in 2018. *Sociología y Tecnociencia*, 11(2), 48–71. <https://doi.org/10.24197/st.2.2021.48-71>
- Rush, M., & Althoff, P. (1971). *Political Sociology: An Introduction*. Thomas Nelson.

